



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI**



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

2023



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas terselesaikannya Laporan Kinerja Puskaji Anggaran tahun 2022 ini dengan baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja (LKj) dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, mengamanatkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022.

Laporan Kinerja (LKj) ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 di lingkungan Pusat Kajian Anggaran (Puskaji Anggaran) dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam indikator-indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan capaian kinerja.

Capaian indikator kinerja menunjukkan kinerja Puskaji Anggaran tahun 2022 telah sesuai dengan tujuan organisasi dan telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut merupakan wujud komitmen yang kuat dari Pimpinan dan seluruh jajaran Puskaji Anggaran.



Besar harapan kami agar kiranya Laporan Kinerja (LKj) Puskaji Anggaran tahun 2022 dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan menjadi pembelajaran yang baik bagi Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI untuk meningkatkan perannya dalam mendukung Kinerja DPR RI pada masa yang akan datang.

Jakarta, 13 Januari 2023
Kepala Pusat Kajian Anggaran

Drs. Helmizar, M.E.
NIP. 196407191991031001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Ringkasan Eksekutif	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Organisasi	3
1. Struktur Organisasi	3
2. Tugas dan Fungsi	4
3. Dukungan SDM	5
4. Anggaran	7
C Isu Strategis	7
D Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	9
B Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja 2022	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A Capaian Kinerja Organisasi	15
1. Capaian Kinerja Tahun 2022	16
2. Kegiatan Tahun 2022.....	18
B Evaluasi Capaian Kinerja	19
1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022 dengan Target PK tahun 2022	20
2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	21
3. Analisis Pencapaian Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja	23
4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan pencapaian kinerja	24
5. Ikatan Analisis APBN Indonesia (IKAPBN)	24
6. Dashboard Daerah Pemilihan	26
7. Open Journal System (OJs) Jurnal Budget	27
8. Kegiatan Magang di Rumah Rakyat Program Kampus Merdeka	28



BAB IV PENUTUP	29
A Kesimpulan	29
B Rekomendasi	30
LAMPIRAN	32



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pusat Kajian Anggaran (Puskaji Anggaran) adalah salah satu dari 5 (lima) Pusat yang ada dalam struktur Badan Keahlian DPR sesuai Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekjen Nomor 24 Tahun 2021.

Pada tahun 2022, Puskaji Anggaran memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp5.691.230.000,- (Rp5.691.230.000,- pagu anggaran 2022 serta Rp.200.000.000,- anggaran tambahan di triwulan IV tahun 2022).

Puskaji Anggaran mampu melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, yaitu dalam indikator kinerja 1, dari 4 dokumen yang ditargetkan dihasilkan 4 dokumen bahan kebijakan Puskaji Anggaran. Dalam indikator kinerja 2, jumlah Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN yang dihasilkan sebanyak 74 Dokumen dari 60 yang ditargetkan atau berhasil mencapai 123% dari target.

Dalam indikator kinerja 3 Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Puskaji Anggaran yang ditargetkan adalah 3,07, namun Puskaji Anggaran berhasil memperoleh nilai 3,29. Selanjutnya target realisasi anggaran yang ditetapkan sebesar 96% Puskaji Anggaran berhasil mencapai realisasi sebesar 99,99%. Capaian tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4
Meningkatkan kualitas kajian dalam peyusunan dan penetapan anggaran terkait dengan pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR	1. Persentase analisis/referensi/laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%
	2. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Kajian Anggaran	3,07	3,29
	3. Persentase penyerapan Anggaran Pusat Kajian Anggaran	96%	99,99%

Hasil dari evaluasi pencapaian kinerja dalam Laporan Kinerja Puskaji Anggaran ini merupakan bahan pembelajaran yang baik bagi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI khususnya Puskaji Anggaran untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Badan Keahlian dalam memberikan dukungan fungsi Anggaran DPR RI berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Badan Anggaran, Komisi, Panitia Khusus, atau Alat Kelengkapan DPR RI yang melaksanakan fungsi Anggaran.

Badan Keahlian DPR RI terdiri atas 5 (lima) pusat yaitu: Pusat Kajian Anggaran, Pusat Perancangan Undang-Undang, Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU, Pusat Penelitian dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.

Puskaji Anggaran sebagai sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan tentang APBN kepada DPR RI. Pada bulan Maret 2022 terjadi pergantian Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Kepala Pusat dilingkungan Badan Keahlian yaitu **Drs. Helmizar M.E. menjadi Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI**, berdasarkan SK Sekretaris Jenderal Nomor 683/SEKJEN/2022 tanggal 15 Maret 2022.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik



Indonesia, Puskaji Anggaran mempunyai tugas untuk mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI, adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kajian Anggaran; Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Kajian Anggaran; Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Kajian Anggaran;
- b. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Kajian Anggaran;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pengkajian anggaran;
- d. Pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran; Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran; Penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Anggaran; dan,
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI.

Sebagai bagian dari instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara, Puskaji Anggaran berupaya melaksanakan tata kelola secara profesional berdasarkan prinsip *good governance*. Dalam penerapan prinsip *good governance*, transparansi dan akuntabilitas menjadi persyaratan utama yang harus dipenuhi.

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Puskaji Anggaran sebagai unit eselon II Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI berkewajiban menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja (LKj) Puskaji Anggaran merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat dalam mencapai visi dan misi, tujuan serta sasaran kinerja yang telah ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja (PK) Puskaji Anggaran, sekaligus sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja tahun mendatang. Selain itu, sebagai media untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Puskaji Anggaran kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.



1. Organisasi

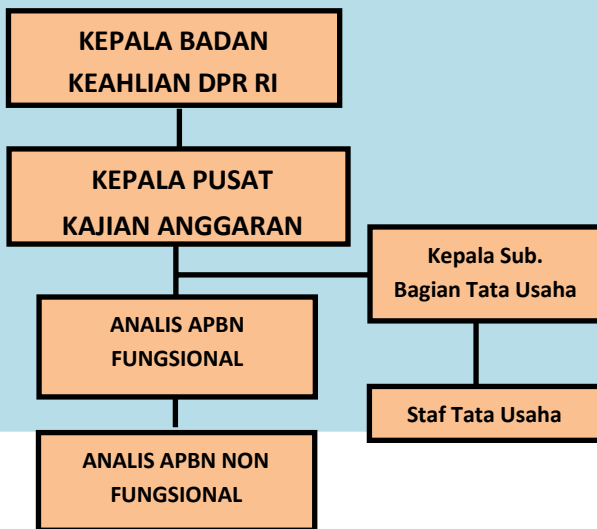
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6/SEKJEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016. Puskaji Anggaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI.

a. Struktur Organisasi

Puskaji Anggaran berada di bawah Badan Keahlian DPR RI dan dipimpin oleh Kepala Pusat serta dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yaitu analis APBN serta kelompok struktural Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Puskaji Anggaran.

Adapun pengorganisasian di Puskaji Anggaran sebagaimana bagan berikut ini:

Bagan 1.
Struktur Organisasi
Pusat Kajian Anggaran



b. Tugas dan Fungsi

Pusat Kajian Anggaran yang selanjutnya disebut Puskaji Anggaran sesuai dengan Pasal 303 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2016 mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang Perancangan APBN.

Sebagai salah satu unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keahlian DPR RI, Puskaji Anggaran bertugas melakukan :

- Analisis/Referensi/ARC terkait Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2023;
- Analisis/Referensi/ARC terkait RUU RAPBN Tahun 2023;
- Analisis/Referensi/ARC terkait RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2021;
- Jurnal APBN;



- Buletin APBN
- Budget Issue Brief Komisi I – XI
- Budget Issue Brief Akuntabilitas Komisi I – XI
- Sekilas APBN

c. Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Puskaji Anggaran didukung SDM sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang pegawai, yang terdiri dari:

- 1 (satu) orang Pejabat Eselon II (Kepala Pusat Kajian Anggaran);
- 1 (satu) orang Eselon IV (Kepala Sub Bagian Tata Usaha);
- 21 (dua puluh satu) orang fungsional Analis APBN yang meliputi 2 (dua) orang fungsional Analis APBN Ahli Madya, 10 (sepuluh) orang fungsional Analis APBN Ahli Muda dan 9 (sembilan) orang fungsional Analis APBN Ahli Pertama;
- 1 (satu) orang Staf Tata Usaha;
- 17 (sembilan belas) orang Analis Non Fungsional (PPNASN), dan
- 2 (dua) orang tenaga Pramubakti.

Komposisi SDM Puskaji Anggaran Badan Keahlian DPR RI tersaji pada Tabel 1.1. berikut.

Tabel 1.
Komposisi SDM Puskaji Anggaran

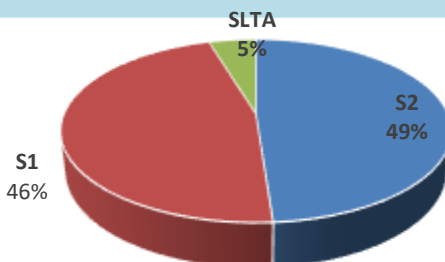
No.	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	Kepala Pusat Kajian Anggaran	1
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
3.	Analis APBN Ahli Madya	2
4.	Analis APBN Ahli Muda	10
5.	Analis APBN Ahli Pertama	9
6.	Pengelola Data	1



7.	Analisis Non Fungsional (PPNASN)	17
8.	Pramubakti	2
Jumlah		43

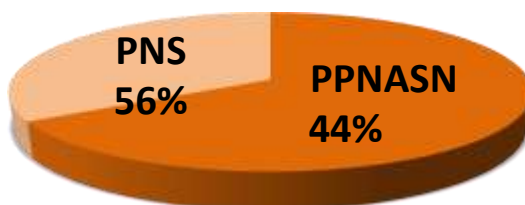
Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, SDM Puskaji Anggaran terdiri dari Strata 2 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, Strata 1 sebanyak 20 (dua puluh) orang, dan SLTA sebanyak 2 orang.

Grafik 1.
Komposisi SDM Puskaji Anggaran



Sementara itu, jika dilihat dari perbandingan jumlah SDM yang berstatus PNS dengan SDM yang berstatus PPNASN di Puskaji Anggaran adalah 56% PNS (Struktural dan Fungsional) dan 44% PPNASN (Analisis Non Fungsional dan Pramubakti).

Grafik 2.
Komposisi PNS dan PNASN Puskaji Anggaran





d. Anggaran

Anggaran Puskaji Anggaran tahun 2022 bersumber dari APBN TA 2022. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Puskaji Anggaran memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp5.491.230.000,-** dan memperoleh tambahan anggaran pada Triwulan IV sebesar **Rp.200.000.000,-** sehingga anggaran Puskaji Anggaran menjadi **Rp5.691.230.000,-**.

2. Isu Strategis

Ekspektasi yang tinggi dari masyarakat kepada DPR RI dalam proses penyusunan RAPBN yang efektif dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, merupakan tantangan bagi Puskaji Anggaran untuk dapat memberikan kajian/analisis yang berkualitas kepada DPR RI dalam melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan APBN. Kajian yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi DPR RI dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan.

Sebagai unsur sistem pendukung Dewan di bidang keahlian terutama terkait dengan Anggaran, Puskaji Anggaran mempunyai tugas pokok membuat kajian/analisis yang akan disampaikan kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Selain itu, kajian/analisis Puskaji Anggaran juga disampaikan kepada perguruan tinggi, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan eksternal terkait lainnya. Untuk itu, penataan personil, tata kerja internal maupun eksternal, komunikasi dan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan perlu dikembangkan lebih optimal lagi.



3. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Puskaji Anggaran Tahun 2022 di susun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan hal-hal umum tentang organisasi, uraian singkat tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, serta komposisi pegawai dan sumber daya dan anggaran yang tersedia.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana strategis 2016-2021 dan rencana kinerja Tahun 2022, serta perjanjian kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2022. Pada bab ini disampaikan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis, program utama dan kegiatan pokok.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
- B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, dan analisis akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pusat Kajian Anggaran serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Pusat Kajian Anggaran sebagai salah satu unsur pendukung yang berada di bawah Badan Keahlian DPR RI berperan aktif melaksanakan tugas dan fungsi BKD dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI khususnya dalam menyediakan analisis terkait APBN. Untuk dapat fokus melaksanakan fungsi tersebut, Puskaji Anggaran mempunyai visi :

“Menjadi Pusat Kajian Anggaran yang Profesional, Andal dan Akuntabel”

Tahun 2022 merupakan tahun ke tujuh bagi Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI menjalankan tugas dan fungsinya. Hingga saat ini Pusat Kajian Anggaran masih perlu melakukan pembenahan, karena di satu sisi harus menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan keahlian kepada DPR RI secara optimal tetapi di sisi lain harus terus menata kelembagaannya agar dapat mencapai visinya, yaitu “Menjadi Organisasi Penyedia Kajian/Analisis APBN yang Profesional, Modern dan Terpercaya.”

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, sebagai bagian dari proses pencapaian akuntabilitas kinerja maka Pusat Kajian Anggaran perlu menyusun rencana kerja sebagai panduan arah kebijakan, strategi, dan target yang akan dicapai pada tahun 2022 serta kebutuhan penganggarnya.



Rencana kerja disusun sebagai bagian dari proses kesinambungan perencanaan strategis Pusat Kajian Anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keahlian DPR RI 2020-2024.

Selanjutnya dalam Rencana Kerja dan Kebutuhan Anggaran akan dijelaskan Arah Kebijakan, Strategi, Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja. Selanjutnya tema yang diangkat dalam rencana kerja Pusat Kajian Anggaran Tahun 2022 adalah mempertajam Analisis Politik Anggaran APBN.

Dukungan kajian anggaran yang dilakukan harus menghasilkan kajian-kajian APBN yang mampu memberikan rekomendasi bagi DPR RI dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban APBN. Selanjutnya DPR RI dapat memanfaatkan hasil-hasil analisis APBN tersebut dalam menjalankan fungsi anggarannya. Output dari Kegiatan Penyusunan Kajian Anggaran untuk tahun 2022 adalah analisis/referensi/laporan/brief APBN.

Adapun target dari masing-masing indikator tersebut adalah:

1. Target kinerja utama (*cascading*) dari Bahan Kebijakan ditetapkan sebanyak 4 (empat) laporan, yaitu; Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Kinerja dan Dokumen kebijakan Lainnya.
2. Target kinerja utama (*cascading*) dari Target Analisis/ Referensi/ Laporan APBN adalah sebanyak 60 (lima puluh) produk yang terdiri dari analisis/referensi/ARC, Jurnal, buletin APBN, dan Buku APBN.

A. Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja 2022.

Sesuai dengan rencana strategis di atas, kemudian dijabarkan lebih luas dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Puskaji Anggaran maka disusunlah Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2022 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini



merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Penetapan Kinerja ini selanjutnya akan dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja Tahunan yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalan pada akhir periode.

Puskaji Anggaran pada tahun 2022 telah menetapkan target sebagaimana dalam dokumen RKT maupun PK tahun 2022 adalah sebanyak 64 dokumen.

Tabel 2.
Penetapan Kinerja
Pusat Kajian Anggaran Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4
Meningkatkan kualitas kajian dalam penyusunan dan penetapan anggaran terkait dengan pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR	1. Persentase analisis/referensi/laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%
	2. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Kajian Anggaran	3,07	3,29
	3. Persentase penyerapan Anggaran Pusat Kajian Anggaran	96%	99,9%



Tabel 2.
Perbandingan Capaian Kinerja
Pusat Kajian Anggaran Tahun 2021 dan 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan kualitas kajian dalam peyusunan dan penetapan anggaran terkait dengan pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR	1. Persentase analisis/referensi/laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%	100%	100%
	2. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Kajian Anggaran	3,00	3,20	3,07	3,29
	3. Persentase penyerapan Anggaran Pusat Kajian Anggaran	95%	99,86%	96%	99,99%



Adapun rincian dokumen, yang telah diselesaikan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Bahan kebijakan Pusat Kajian Anggaran:	
1	Rencana Kerja
2	Rencana Anggaran;
3	Laporan Kinerja (LKj); dan
4	Kebijakan-kebijakan Pusat;
Analisis :	
5	Jurnal Budget Vol 7 Edisi 1
6	Jurnal Budget Vol 7 Edisi 2
7	Buku Tinjauan atas Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal Tahun 2023
8	Buku Kajian Pagu Indikatif mitra Kerja Komisi I
9	Buku Kajian Pagu Indikatif mitra Kerja Komisi II
10	Buku Kajian Pagu Indikatif mitra Kerja Komisi III
11	Buku Kajian Pagu Indikatif mitra Kerja Komisi IV
12	Buku Kajian Pagu Indikatif mitra Kerja Komisi V
13	Buku Kajian Pagu Indikatif mitra Kerja Komisi VI
14	Buku Kajian Pagu Indikatif mitra Kerja Komisi VII
15	Buku Kajian Pagu Indikatif mitra Kerja Komisi VIII
16	Buku Kajian Pagu Indikatif mitra Kerja Komisi IX
17	Buku Kajian Pagu Indikatif mitra Kerja Komisi X
18	Buku Kajian Pagu Indikatif mitra Kerja Komisi XI
19	Tinjauan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN
20	Buletin APBN Edisi 1
21	Buletin APBN Edisi 2
22	Buletin APBN Edisi 3



23	Buletin APBN Edisi 4
24	Buletin APBN Edisi 5
25	Buletin APBN Edisi 6
26	Buletin APBN Edisi 7
27	Buletin APBN Edisi 8
28	Buletin APBN Edisi 9
29	Buletin APBN Edisi 10
30	Buletin APBN Edisi 11
31	Buletin APBN Edisi 12
32	Buletin APBN Edisi 13
33	Buletin APBN Edisi 14
34	Buletin APBN Edisi 15
35	Buletin APBN Edisi 16
36	Buletin APBN Edisi 17
37	Buletin APBN edisi 18
38	Buletin APBN Edisi 19
39	Buletin APBN Edisi 20
40	Buletin APBN Edisi 21
41	Buletin APBN Edisi 22
42	Buletin APBN Edisi 23
43	Buletin APBN Edisi 24
Analisis Ringkas Cepat (ARC) :	
44	Kajian Singkat Akuntabilitas mitra Komisi Edisi 1
45	Kajian Singkat Akuntabilitas mitra Komisi Edisi 2
46	Budget Issue Brief Edisi 1
47	Budget Issue Brief Edisi 2
48	Budget Issue Brief Edisi 3
49	Budget Issue Brief Edisi 4



50	Budget Issue Brief Edisi 5
51	Budget Issue Brief Edisi 6
52	Budget Issue Brief Edisi 7
53	Budget Issue Brief Edisi 8
54	Budget Issue Brief Edisi 9
55	Budget Issue Brief Edisi 10
56	Budget Issue Brief Edisi 11
57	Budget Issue Brief Edisi 12
58	Budget Issue Brief Edisi 13
59	Budget Issue Brief Edisi 14
60	Budget Issue Brief Edisi 15
61	Budget Issue Brief Edisi 16
62	Budget Issue Brief Edisi 17
63	Budget Issue Brief Edisi 18
64	Budget Issue Brief Akuntabilitas Edisi 10
65	Budget Issue Brief Akuntabilitas Edisi 11
66	Budget Issue Brief Akuntabilitas Edisi 12
67	Budget Issue Brief Akuntabilitas Edisi 13
68	Budget Issue Brief Akuntabilitas Edisi 14
69	Budget Issue Brief Akuntabilitas Edisi 15
70	Budget Issue Brief Akuntabilitas Edisi 16
71	Budget Issue Brief Akuntabilitas Edisi 17
Referensi :	
72	Buku TKDD
73	Proceding Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023
74	Buku Kajian dan Infografis Atas Nota Keuangan RAPBN Tahun 2023





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil dan manfaat (*outcome*) serta dampak (*impact*).

Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok *input* dan *output*; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (*target*); mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan; dan menghitung rencanadan realisasi berdasarkan persentasenya.

Analisis pencapaian kinerja sebagai parameter untuk mengukur tingkat keberhasilan program telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Evaluasi pencapaian kinerja dilakukan dengan mengolah data dari Perencanaan dan Penetapan Kinerja serta Rencana Kegiatan Tahunan.

Salah satu yang menjadi tolak ukur dalam penyusunan LAK ini adalah dokumen penetapan kinerja Puskaji Anggaran tahun 2022 yang dibandingkan dengan pencapaian realisasi *output* Puskaji Anggaran tahun 2021 dan juga pencapaian realisasi pada tahun sebelumnya.



1. Capaian Kinerja Tahun 2022

Pada Tahun 2022 Puskaji Anggaran telah menetapkan target sebagaimana dalam dokumen RKT maupun PK adalah sebanyak 64 dokumen. Dari target 64 dokumen tersebut, realisasi kinerja tahun 2022 adalah sebanyak 100%

Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada bagan dan tabel berikut ini:

Bagan 2. Capaian Kinerja Tahun 2022





Tabel 3.
Penetapan dan Realisasi Kinerja
Pusat Kajian Anggaran
Tahun Anggaran 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4
Meningkatkan kualitas kajian dalam peyusunan dan penetapan anggaran terkait dengan pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR	1. Persentase analisis/referensi/laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%
	2. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Kajian Anggaran	3,07	3,29
	3. Persentase penyerapan Anggaran Pusat Kajian Anggaran	96%	99,9%



2. Kegiatan Tahun 2022

a) Kegiatan Utama

- 1) Diskusi dan Konfirmasi Data Puskaji Anggaran ke Daerah (Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan lain-lain) terkait kajian;
- 2) Pendalaman materi dengan mengundang Pakar untuk berdiskusi/seminar bersama Kementerian/Lembaga dan Perguruan Tinggi baik secara daring maupun luring;
- 3) Penelitian bersama antara Pusat Kajian Anggaran dan Universitas Muhammadiyah Cirebon dalam rangka penyusunan Kajian tentang 7 tahun implementasi Dana Desa;

b) Kegiatan Pelengkap

- 1) Kegiatan Kepala Pusat Kajian Anggaran dan Analis APBN menjadi narasumber dan *keynotespeaker* dalam acara: Kuliah umum; Pembekalan bagi tenaga Ahli dan; Kegiatan lainnya seperti Kampus Merdeka;
- 2) Peningkatan Capacity Building bagi para pegawai negeri sipil di lingkungan Puskaji Anggaran dengan mengikuti Diklat bersama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Setjen DPR RI;
- 3) Pembuatan dalam rangka Dashbord Indikator dan Anggaran Dana Perimbangan DAPIL bagi anggota Dewan;
- 4) Pembuatan dalam rangka *Open Journal System (OJS)* Jurnal *Budget*. Isu dan Masalah Keuangan Negara di Lingkungan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI;
- 5) Terbentuknya badan hukum Ikatan Analis APBN Indonesia (IKAPBN) berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0012239.AH.01.07.TAHUN 2022



c) Kegiatan tambahan

- 1) Penerimaan tamu dari dalam negeri: DPRD Kabupaten Banjar dan luar negeri: delegasi Thailand dalam kegiatan PCASIA 2022
- 2) Undangan Workshop dari eksternal Pusat Kajian Anggaran: The Westminster Foundation For Democracy (WFD)
- 3) Terlaksananya kegiatan magang mahasiswa/i di Rumah Rakyat program Kampus Merdeka Kemendikbud Ristek RI di Pusat Kajian Anggaran.

B. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Evaluasi capaian kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi capaian kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Puskaji Anggaran dapat dinilai melalui 2 (dua) aspek, yaitu Kegiatan Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Aspek Keuangan. Analisis akuntabilitas kinerja diawali dengan kegiatan penetapan target kinerja, penetapan indikator kinerja, dan pengukuran kinerja. Sedangkan aspek keuangan merupakan analisis penggunaan anggaran melalui realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh Puskaji Anggaran dalam membiayai suatu kegiatan.

Analisis akuntabilitas kinerja pada dasarnya digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan tujuan, sasaran dan



kegiatannya. Oleh karena itu, maka analisis akuntabilitas kinerja untuk selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Penetapan target kinerja Puskaji Anggaran disesuaikan dengan DIPA Puskaji Anggaran.

**SASARAN
STRATEGIS**

Meningkatkan kualitas kajian dalam penyusunan dan penetapan anggaran terkait dengan pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR



a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022 dengan Target PK Tahun 2022.

Untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan sesuai dengan perencanaan awal, maka diperlukan evaluasi capaian kinerja dan kesesuaiannya dengan target Perjanjian Kinerja yang di tandatangani sebelumnya.

**Tabel 4.
Perbandingan Target PK 2022 dengan
Realisasi Tahun 2021-2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan kualitas kajian dalam peyusunan dan penetapan anggaran terkait dengan pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR	4. Persentase analisis/referensi/laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%	100%	100%
	5. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Kajian Anggaran	3,00	3,20	3,07	3,29
	6. Persentase penyerapan Anggaran Pusat Kajian Anggaran	95%	99,86%	96%	99,99%



Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, terlihat bahwa kinerja Puskaji Anggaran pada tahun 2022 dalam hal tersedianya bahan kebijakan pusat dan analisis/referensi/laporan tentang APBN telah melampaui target yang direncanakan. Nilai capaian tahun 2022 sebesar 100%, yang dihitung dari perbandingan antara target dokumen dengan realisasi output dokumen.

Selain capaian tersebut, ditahun 2022 Puskaji Anggaran juga telah mempublikasikan output-outputnya melalui website, media sosial, dan dokumen elektronik (*WA/SMS Blast*) kepada Pimpinan Anggota DPR RI dan pihak eksternal.

b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1.1. Anggaran

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Puskaji Anggaran diberikan alokasi anggaran berdasarkan DIPA Satuan Kerja Setjen DPR RI Tahun 2021 sebesar **Rp.5.691.230.000,-** (Rp5.491.200.000,- pagu T.A. 2022 serta tambahan anggaran pada triwulan IV sebesar Rp.200.000.000,-).

Melalui pelaksanaan program kegiatannya, sampai dengan akhir bulan Desember 2022, Puskaji Anggaran telah merealisasikan penggunaan anggaran sebesar **Rp5.690.385.194,- atau 99,9%**, yang dipergunakan untuk:

1. 962 Layanan Umum sebesar Rp3.200.476.444,- (56.2%);
2. 963 Layanan Data dan Informasi sebesar Rp680.310.100,- (11.9%);
3. 994 Layanan Perkantoran sebesar Rp1.809.598.650,- (31.8%).



1.2. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM Pusaka Anggaran berjumlah 43 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.
Komposisi SDM Pusaka Anggaran

No.	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	Kepala Pusat Kajian Anggaran	1
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
3.	Analisis APBN Ahli Madya	2
4.	Analisis APBN Ahli Muda	10
5.	Analisis APBN Ahli Pertama	9
6.	Pengelola Data	1
7.	Analisis Non Fungsional (PPNASN)	17
8.	Pramubakti (PTT)	2
Jumlah		43

Dari sisi kuantitas, jumlah SDM Pusaka Anggaran, yang terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Eselon II (Kepala Pusat Kajian Anggaran); 1 (satu) orang Eselon IV (Kepala Sub Bagian Tata Usaha); 21 (dua puluh satu) orang fungsional Analisis APBN yang meliputi 2 (dua) orang fungsional Analisis APBN Ahli Madya, 10 (sepuluh) orang fungsional Analisis APBN Ahli Muda dan 9 (sembilan) orang fungsional Analisis APBN Ahli Pertama; 1 (satu) orang Staf Tata Usaha; 17 (sembilan belas) orang Analisis Non Fungsional (PPNASN), dan 2 (dua) orang tenaga Pramubakti.

Meski secara jumlah SDM Pusaka Anggaran masih kurang, namun Pusaka Anggaran telah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan target



yang telah ditetapkan. Para Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran telah mampu menghasilkan telaahan/kajian/analisis yang inovatif dan berkualitas Sedangkan tenaga administrasi meski jumlahnya minim, namun telah mampu melaksanakan tugas administrasi dengan sangat baik.

Dari sisi kualitas, SDM Puskaji Anggaran masih perlu meningkatkan pendidikan formal dan Diklat Teknis. Untuk meningkatkan pendidikan formalnya, SDM Puskaji Anggaran perlu mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (S2 dan S3). Sedangkan untuk meningkatkan pendidikan informalnya, SDM Puskaji Anggaran perlu mendapatkan tambahan pengetahuan, misalnya dengan mengikuti diklat-diklat, bimtek, ataupun diskusi/seminar.

1.3. Sarana dan Prasarana

Dengan komposisi pegawai Puskaji Anggaran yang saat ini berjumlah 43 orang, tersedia 3 ruangan kerja dan 1 ruang rapat serta 28 Komputer. Namun untuk mendukung peningkatan kinerja Puskaji Anggaran ke depan, diperlukan dukungan prasarana seperti komputer dan printer perlu segera dipenuhi serta penambahan pegawai PNS perlu dipertimbangkan.

3. Analisis Pencapaian Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Pada tahun 2022 Pusat Kajian Anggaran telah mencapai keberhasilan atau peningkatan kinerja, bahkan di tahun tersebut keberhasilan kinerja telah melebihi dari target yang telah ditetapkan. Keberhasilan atau peningkatan kinerja tersebut dikarenakan oleh beberapa hal berikut, antara lain:

a. Komitmen yang kuat dari Kepala Pusat Kajian Anggaran



dan seluruh staf/Analisis APBN untuk memajukan Pusat Kajian Anggaran yang diantaranya dilakukan melalui peningkatan keahlian, keterampilan dan wawasan para pegawai melalui kegiatan pelatihan/*workshop*/diskusi pakar.

- b. Adanya peran para Analisis APBN Non Fungsional (PPNASN) yang turut membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Kajian Anggaran.
- c. Adanya kerja sama yang sinergis antara pejabat/staf, Analisis APBN dan para Analisis APBN Non Fungsional dalam mencapai target kinerja yang telah direncanakan dan ditetapkan bersama.
- d. Adanya dukungan Kepala Pusat Kajian Anggaran kepada para analisis dalam berkreaitivitas sehingga dapat menghasilkan telaahan/referensi/analisis yang memenuhi target dan lebih berkualitas.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Puskaji Anggaran tidak lepas dari kebijakan program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Pusat Kajian Anggaran. Program/kegiatan yang ditetapkan umumnya sangat mendukung semua tugas dan fungsi Puskaji Anggaran dan mengarah kepada peningkatan wawasan dan kreativitas Analisis APBN Puskaji Anggaran.

Adapun program/kegiatan yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan, *workshop* dan diskusi bersama para pakar yang berguna dalam menambah keterampilan dan wawasan para pegawai serta para analisis APBN. Dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan, *workshop* dan diskusi, maka hasil telaahan/kajian/analisis yang dihasilkan sudah jauh lebih berkualitas dan lebih baik dari sebelumnya sedangkan jumlah telaahan/kajian/analisis telah memenuhi target.



Program/kegiatan PusKaji Anggaran tahun 2022 dilaksanakan dengan terencana menggunakan *time schedule* yang terukur. Dengan perencanaan yang baik dan dipatuhi bersama sehingga produk analisis/ referensi/laporan tentang APBN dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

5. Pembentukan Ikatan Analis APBN Indonesia (IKAPBN)

Dinamika permasalahan publik dan agenda-agenda pembangunan yang semakin kompleks, menuntut kepedulian dan kontribusi seluruh pihak atau *stakeholders* yang berkepentingan. Analis APBN harus mampu membangun dirinya dan mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak. Tuntutan untuk mampu berkolaborasi dengan akademisi, praktisi, pemerintah daerah, dan bahkan dengan masyarakat sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan nasional menjadi tantangan bagi para analis APBN. Kolaborasi tersebut dibutuhkan guna mengoptimalkan peran Analis APBN dalam mewujudkan APBN yang semakin berkualitas di masa mendatang.

Salah satu kanal yang dapat digunakan Analis APBN guna membangun dirinya dan mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak adalah melalui pembentukan organisasi profesi. Tahun 2022 ini Pusat Kajian Anggaran bersama dengan bagian Pembinaan Jabatan Fungsional Biro Sumber Daya Manusia Aparatur Setjen DPR RI bersinergi merealisasikan terbentuknya organisasi Profesi yang diberi nama Ikatan Analis APBN Indonesia (IKAPBN) dan secara resmi telah melakukan Kongres Pertama pada 12 Desember 2022, dengan agenda pemilihan kepengurusan organisasi untuk periode tahun 2022-2026.

IKAPBN memiliki visi “Terwujudnya Analis APBN berkualitas dan mampu berkontribusi pada peningkatan



kualitas penganggaran di Indonesia”. Guna mewujudkan visi tersebut, IKAPBN harus mampu mewujudkan beberapa langkah strategis ke depannya. Yakni:

1. mendorong tumbuhnya profesionalisme Analis APBN, baik dalam taraf nasional maupun internasional;
2. mengembangkan kompetensi Analis APBN;
3. melaksanakan kerjasama dan membangun jejaring dengan pemangku kebijakan APBN, pemangku kebijakan lainnya, lembaga sejenis, dan masyarakat.

IKAPBN kedepannya akan menjadi organisasi profesi bagi Analis APBN, diharapkan tidak hanya sebatas organisasi tempat berkumpulnya Analis APBN secara administratif. Namun, lahirnya organisasi ini diharapkan mampu mewujudkan Analis APBN yang berkualitas dan Analis APBN yang mampu berkontribusi pada peningkatan kualitas penganggaran di Indonesia.

6. Pembuatan *Dashboard* Indikator dan Anggaran Dana Perimbangan Daerah Pemilihan.

Tugas penting dari seorang Anggota DPR adalah mengawasi dan memonitor efektifitas pendanaan dari pemerintah pusat kepada daerah agar dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pemilihannya. Indikator kesejahteraan masyarakat dapat tercermin dari meningkatnya beberapa indikator yang telah disebutkan di atas, yaitu menurunnya angka/persentase tingkat kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran, meningkatnya IPM daerah, dan membaiknya indikator pendidikan dan kesehatan di daerah.

Informasi tentang besaran dana perimbangan dan data indikator kesejahteraan masyarakat bisa diperoleh dari berbagai sumber resmi dan dapat diakses secara bebas.



Namun demikian, diperlukan waktu untuk dapat diolah menjadi satu informasi yang utuh mengenai kinerja anggaran dan kesejahteraan masyarakat di daerah pemilihannya. Tingginya intensitas kerja dan mobilitas serta padatnya kegiatan Anggota DPR seringkali menuntut ketersediaan data dalam waktu yang relatif cepat untuk mendukung kualitas pengambilan keputusan/kebijakan yang sedang diperjuangkannya. Keberadaan website/situs yang secara khusus merangkum kebutuhan informasi yang dibutuhkan Anggota DPR menjadi satu kebutuhan yang mendesak untuk diwujudkan.

Pusat Kajian Anggaran berinisiatif membangun database dana perimbangan dan indikator kesejahteraan wilayah yang dikelompokkan berdasarkan Daerah Pemilihan Anggota DPR. Database ini dinamakan "INANG DAPIL" yaitu Indikator dan Anggaran Dana perimbangan Daerah Pemilihan. Data yang dimuat dalam dashboard ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Informasi Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH, DID, Dana Desa)
- 2) Indikator kesejahteraan rakyat (IPM, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran, indicator bidang pendidikan dan kesehatan)
- 3) Profil anggota DPR menurut daerah pemilihannya

Data bersumber dari lembaga resmi yang memiliki kewenangan informasi, utamanya dari Kementerian Keuangan dan BPS. Tampilan data dibuat dalam bentuk dashboard grafis agar lebih mudah dipahami.

7. Pembuatan *Open Journal System* (Ojs) Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara di Lingkungan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat



Jenderal DPR RI.

Dalam upaya optimalisasi dukungan anggaran dan pengawasan DPR RI, Jurnal Budget berusaha menggali informasi tidak hanya dari lingkungan internal parlemen saja. Namun upaya tersebut perlu disertai keikutsertaan pihak publik dalam memberikan kajian-kajian atas hasil pembangunan dan isu keuangan negara yang berdasarkan data dan dengan metode yang valid dengan proses review yang memadai.

Jurnal Budget membuka kanal online untuk mengakomodir masuknya kajian-kajian dari publik yang mendorong peningkatan dampak pembangunan bagi masyarakat luas.

Jurnal Budget merupakan salah satu terbitan berkala dari Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember dan mengangkat isu-isu keuangan negara terkini yang dapat menjadi dukungan substansi bagi pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPR RI. Sebagai output yang diterbitkan di lingkungan parlemen, yaitu MPR/DPR/DPD RI, maka diharapkan materi yang disajikan di dalamnya, meskipun bersifat ilmiah dan pembahasan keilmuan/akademik, namun tetap mampu menjadi sumber informasi, memberikan kontribusi data-data, hingga rekomendasi bagi tugas dan kewenangan, khususnya bagi Anggota DPR RI.

8. Penerimaan Mahasiswa/i magang di Rumah Rakyat program Kampus Merdeka Kemendikbud Ristek RI.



DPR RI kembali menerima Mahasiswa/i Magang Program Kampus Merdeka Kemendikbud Ristek RI. Dari 12 ribu pelamar, total 187 mahasiswa/i dari berbagai Perguruan Tinggi mendapatkan kesempatan untuk melakukan magang di DPR RI. Pusat Kajian Anggaran mendapatkan 20 Mahasiswa/i untuk magang di Unit kerja dan dapat belajar serta mendapatkan pengetahuan terkait dukungan fungsi anggaran DPR RI selama periode waktu 6 bulan.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara umum kinerja Puskaji Anggaran mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, yaitu dari 4 dokumen yang ditargetkan dihasilkan 4 dokumen bahan kebijakan Puskaji Anggaran. Dalam Jumlah Analisis/Referensi/ Laporan tentang APBN yang dihasilkan sebanyak 66 Dokumen dari 60 yang ditargetkan atau berhasil mencapai 100%. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan PKA yang ditargetkan adalah 3,22 PKA berhasil memperoleh 3.29. Selanjutnya target realisasi anggaran sebesar 98% Puskaji Anggaran berhasil mencapai realisasi sebesar 99,9%.
2. Pelaksanaan program/kegiatan dilakukan dengan *time schedule* yang terukur sehingga penyediaan bahan analisis/referensi/laporan tentang APBN untuk Dewan dapat terselesaikan tepat waktu;
3. Keberhasilan peningkatan kinerja ini adalah Komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Puskaji Anggaran;
4. Ikatan Analis APBN Indonesia (IKAPBN) merupakan wadah bagi para analis APBN untuk dapat berkolaborasi dengan akademisi, praktisi, pemerintah daerah, dan bahkan dengan masyarakat sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan nasional.
5. *Dashboard* INANG DAPIL mendukung pelaksanaan tugas Anggota DPR di bidang anggaran dan pengawasan serta menjadi sumber referensi bagi Anggota DPR dalam merumuskan kebijakan terkait dengan pembangunan daerah pemilihannya.
6. *Open Journal System* (OJS) memungkinkan pengelola jurnal untuk migrasi dari sistem pengelolaan *offline* menjadi *online*. Mulai dari sebuah manuskrip dikirim oleh penulis, proses reviewing, tracking, dan sebagainya hingga manuskrip tersebut diterima untuk diterbitkan dalam sebuah jurnal, semuanya bisa dilakukan dengan OJS.



7. Kegiatan Magang di Rumah Rakyat, Program Kampus Merdeka Kemendikbud Ristek RI merupakan bentuk dukungan dan kontribusi DPR RI, khususnya Setjen DPR RI dalam mendukung program nasional Kampus Merdeka dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kemendikbud Ristek RI. Kegiatan ini merupakan salah satu sarana *Public Relation* dan promosi para anggota dewan kepada masyarakat luas melalui para Mahasiswa/i terkait tugas serta kegiatan yang terjadi di DPR RI.

B. Rekomendasi

Keberhasilan Pusat Kajian Anggaran dalam mencapai target kinerja yang mendekati target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 merupakan wujud keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pencapaian tersebut tidak lepas dari komitmen bersama seluruh pihak pada Pusat Kajian Anggaran untuk bekerja sama mewujudkan target kinerja, mengingat kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI tidak menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal saja melainkan satu gabungan kontribusi dari semua pihak yang terkait.

Keberhasilan yang sudah dicapai oleh Pusat Kajian Anggaran harus terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya, dan hal ini merupakan tantangan bagi Pusat Kajian Anggaran untuk bisa menjadi lebih baik. Untuk itu, langkah-langkah antisipatif perlu dilakukan antara lain:

1. Diharapkan adanya dukungan dari Kepala Badan Keahlian Dewan dan Sekjen DPR RI dalam hal Penambahan pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil;
2. Diharapkan adanya dukungan dari Sekjen DPR RI dalam hal penambahan anggaran;



3. Diharapkan adanya dukungan dari Sekjen DPR RI sarana kerja seperti komputer/laptop, printer dan tinta printer berwarna, selain itu diperlukan juga akses data untuk keperluan Analis APBN.
4. Untuk meningkatkan Kompetensi Analis APBN, perlu dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait, atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja Analis APBN dan pada organisasi Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI.



LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2022


KEBUNTAHAN INDONESIA
BEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (Dr. Heksisal, M.E.)
Jabatan : Kepala Pusat Kajian Anggaran

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : (Dr. Heksisal Sarwat, S.H., M.Hum.)
Jabatan : Kepala Badan Kelembagaan

selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan berkolaborasi secara utuh dalam mewujudkan target kinerja yang sebagaimana terdapat lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka perbaikan penganggaran dan setajir.

Jakarta, 18 Maret 2022
Pihak Pertama

(Dr. Heksisal, M.E.)
NIP. 19640719 198103 1 901

Pihak Kedua

(Dr. Heksisal Sarwat, S.H., M.Hum.)
NIP. 19630716 198303 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Sasaran Program (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Kualitas kajian kajian dalam uraian dan penyiapan anggaran dengan pelaksanaan Fungsi dan CPN	1. Persentase analisis perencanaan berbasis APBN yang diimplementasikan oleh Ditinstan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
	2. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atau Layanan Pusat Kajian Anggaran	3,07
	3. Persentase penyempurnaan Pusat Kajian Anggaran	98%

Program	Anggaran
Program Manajemen	Rp. 3.836.225.000,-

Jakarta, 18 Maret 2022
Kepala Pusat Kajian Anggaran

(Dr. Heksisal, M.E.)
NIP. 19640719 198103 1 901

Kepala Badan Kelembagaan

(Dr. Heksisal Sarwat, S.H., M.Hum.)
NIP. 19630716 198303 1 001